

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nasib pertanian di kota-kota seperti DKI Jakarta kerap menghadapi tantangan yang cukup kompleks seiring dengan pesatnya arus pembangunan akibat modernisasi. Alih fungsi lahan akibat arus pesatnya arus pembangunan menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi terutama diperuntukan untuk keperluan pembangunan permukiman, industry, perdagangan dan jasa, serta infrastruktur wilayah yang pada dasarnya akan mengkonversikan lahan pertanian produktif (Pertiwi et al., 2006). Pesatnya pertumbuhan penduduk, terutama hal ini disebabkan laju urbanisasi menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk perumahan di perkotaan semakin meningkat pesat, sementara itu lahan di perkotaan ketersediaannya semakin menyempit. (K. Putra & Made, 2014). Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang (Al Hakim Suparlan, 2015). Lahan di Jakarta sangat terbatas. DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan luas wilayah terkecil di Indonesia, memiliki area sekitar 664,01 km². Berdasarkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah penduduk yang tercatat di wilayah ini mencapai sekitar 11.261.595 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2022), persaingan untuk mendapatkan lahan menjadi sangat ketat.

Jenis Usaha	Jumlah		Perubahan (%)
	2013	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Pertanian Perorangan (UTP)	14.139	13.416	-5,11
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB)	48	43	-10,42
Usaha Pertanian Lainnya (UTL)	26	339	1.203,85
Jumlah	14.213	13.798	-2,92

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Pertanian Menurut Jenis Usaha di Provinsi DKI Jakarta (unit), 2013 dan 2023

Kondisi ini mengakibatkan penurunan jumlah usaha pertanian. Berdasarkan hasil pencacahan lengkap ST2023, terdapat 13.798 unit usaha pertanian di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Mayoritas usaha pertanian berupa UTP dengan jumlah 13.416 unit (97,23 persen), sementara UPB tercatat sebanyak 43 unit (0,31

persen), dan UTL sebanyak 339 unit (2,46 persen). Dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 14.213 unit, jumlah usaha pertanian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,92 persen (Statistik & Jakarta, 2023).

Ambisi merubah lahan perkotaan menjadi bangunan produktif seperti pembangunan pemukiman, kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta infrastruktur lokal. Alih fungsi lahan pertanian menjadi hal yang tidak bisa dihindari bagi Jakarta. Dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi, Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang membutuhkan lahan yang memadai (D. Wahyuni, 2022). Segelintir pihak seperti pemerintah dan pihak swasta seringkali berfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat dan efisien, dengan memprioritaskan pengembangan sektor-sektor tersebut. Setiap tahun untuk lahan pertanian selalu mengalami peralihan fungsi dari lahan sawah ke non sawah (Abidin & Larekeng, 2024).

Kampung bayam merupakan sebuah perkampungan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, yang terletak di mana pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dilakukan di wilayah yang sebelumnya merupakan perkampungan yang telah berdiri selama puluhan tahun. Keberadaan kampung tersebut terancam karena dalam proses pembangunan JIS, area tersebut harus digusur oleh pihak pengembang. Dalam situasi ini, masyarakat dan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani setempat berada dalam posisi yang lemah, karena keterbatasan kekuatan dan sumber daya untuk mempertahankan tempat tinggal mereka atau menghadapi pihak-pihak terkait. (A. T. Putra, 2023).

Masalah dimulai ketika kelompok tani kampung bayam terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Kelompok tani kampung bayam mengalami penguasaan lahan sepihak akibat ambisi pembangunan kota. Mereka dijanjikan akan mendapatkan hunian pengganti atas relokasi pembangunan Jakarta Internasional Stadium. Hunian tersebut dinamakan Kampung Susun Bayam, yang sampai saat ini belum juga dapat ditempati dan dinikmati oleh mereka meskipun sudah banyak alur birokrasi yang dilalui oleh Kelompok Tani Kampung Bayam. Oleh karena itu bahkan sampai saat ini kelompok tani kampung bayam masih menempati hunian sementara yang letaknya jauh dari tanah tempat tinggal mereka

sebelumnya. Pelanggaran janji terhadap Kelompok Tani Kampung Bayam berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sebagai pihak yang terdampak akibat pembangunan, kompensasi menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan kesejahteraan mereka di masa depan. Secara ekonomi, mereka kehilangan tempat tinggal dan aset, yang bagi kelompok rentan berarti kehilangan sumber penghidupan. Kehilangan dua aspek penting ini secara bersamaan juga berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan (A. T. Putra, 2023). Padahal, perhatian akan kompensasi yang cukup dan memadai sangat penting untuk dilakukan, terutama dalam kasus di mana korban utamanya adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan menghadapi tantangan untuk bertahan hidup tanpa bantuan yang tepat dan berkelanjutan.

Kasus di Kampung Bayam memperlihatkan bagaimana kebutuhan akan lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur kota bertabrakan dengan hak-hak warga yang telah lama tinggal di area tersebut. Selain itu, masalah administratif seperti sertifikat tanah ganda dan tumpang tindih kepemilikan tanah juga menjadi sumber konflik yang signifikan. Ketidakjelasan batas wilayah serta penegakan hukum yang lemah memperparah situasi ini. Penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur atau proyek lainnya sering kali menimbulkan resistensi dari masyarakat yang terkena dampak, yang merasa hak-haknya tidak dihargai atau tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Pembangunan di wilayah perkotaan biasanya hanya terkonsentrasi pada pembangunan fisik dan penyesuaian fungsi lahan (R. Wahyuni, 2022). Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah mengambil alih lahan melalui klaim sebagai tanah negara. Namun, di sisi lain, lahan-lahan tersebut telah dikuasai oleh masyarakat sejak lama. (R. Wahyuni, 2022).

Dalam konteks penguasaan lahan perkotaan, perlawanan dari masyarakat lokal sering kali muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Ketidakseimbangan dalam kepemilikan tanah menjadi faktor utama penyebab konflik pertanahan, di mana dalam perebutan tanah sering kali memunculkan aksi perlawanan. (Mustopa et al., 2020). Selain itu, upaya pemerintah dan swasta dalam menggusur dan menguasai lahan seringkali tidak

diimbangi dengan solusi yang adil dan memadai bagi warga yang terdampak. Perlawanan Kelompok Tani Kampung Bayam terhadap upaya penguasaan lahan ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks antara kebijakan pemerintah dan hak-hak warga. Perlawanan kelompok tani Kampung Bayam Madani diwujudkan melalui aksi-aksi protes, dalam menghadapi resiko tekanan dari pihak berwenang, baik berupa intimidasi, kebijakan sepihak, hingga kriminalisasi. Upaya warga Kampung Bayam dalam mempertahankan hak atas lahan dan tempat tinggal mereka merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan upaya untuk mempertahankan identitas serta keberlangsungan hidup mereka di tengah arus perubahan yang cepat.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, maka penelitian ini terfokus pada, bentuk perlawanan dan resiko yang harus dihadapi oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani. sebagai representasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh petani kota khususnya di DKI Jakarta. Fakta krisis alih fungsi lahan di kota besar dapat diartikan sebagai sebuah resiko modernisasi akibat ketidakpastian kesepakatan oknum perkotaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlawanan kelompok tani kampung bayam madani dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak?
2. Bagaimana bentuk resiko kelompok tani kampung bayam madani dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan deskripsi bentuk perlawanan kelompok tani kampung bayam madani dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak.
2. Mendapatkan analisis resiko kelompok tani kampung bayam madani dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Akademis

Memperluas pembicaraan dan pemahaman tentang cara strategi masyarakat tertentu, khususnya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani sebagai bentuk perlawanan dan resiko dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memungkinkan peneliti sosial, masyarakat umum, lembaga pemerintah, dan komunitas masyarakat tertentu untuk melihat dan memahami bagaimana perlawanan dan resiko dalam menghadapi alih fungsi lahan sepihak yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian berperan dalam memastikan fokus penelitian dalam skripsi ini, sehingga dapat menghindari penyimpangan dan perluasan dari pokok permasalahan. Hal ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan batasan penelitian yang akan difokuskan pada bagaimana perlawanan dan resiko petani kota yang dalam hal ini adalah kelompok tani Kampung Bayam Madani dalam menghadapi konflik penguasaan lahan sepihak. Penelitian ini menggunakan teori perlawanan repertoire Charles Tilly, teori *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* dan teori masyarakat risiko Ulrich Beck dalam menganalisis bagaimana perlawanan yang terjadi adalah pengulangan tindakan dengan strategi baru untuk melawan dan bagaimana risiko yang dihadapi dalam menghadapi alih fungsi lahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan yang terbagi ke dalam Bab, kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam Sub Bab, dengan format sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul yang memaparkan tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai pijakan penelitian dalam memahami dan menganalisa fenomena yang terjadi di lapangan. Bab ini terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai gambaran umum metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang data-data deskripsi dan analisis hasil penelitian yang membahas tentang bentuk perlawanan dan resiko yang harus dihadapi oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. Di sini peneliti menarik kesimpulan dengan menjelaskan secara singkat mengenai Bentuk perlawanan dan resiko yang harus dihadapi oleh Kelompok Tani Kampung Bayam Madani.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi informasi mengenai bahan bacaan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan proposal. Daftar pustaka mencakup berbagai sumber, seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel, dan berita.